

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dilihat dari aspek kelembagaan, maupun dari perkembangan asset, dana pihak ketiga (DPK) maupun dari sisi pembiayaan (*financing*). Perkembangan perbankan syariah ke depan diyakini akan tetap tumbuh secara lebih baik mengingat kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah semakin meningkat dan potensinya sangat luar biasa mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan demikian perbankan syariah ke depan diyakini akan tumbuh dengan cukup tinggi.

Pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990, tepatnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam lagi pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta, tanggal 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Adapun kelompok kerja yang dimaksud adalah Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.<sup>1</sup>

Hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>2</sup>

Sedangkan secara yuridis, di tataran Undang-Undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and*

---

52. <sup>1</sup> Sumar'in, 2012, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.

<sup>2</sup> *Ibid.*

*loss sharing*), tidak berdasarkan atas bunga. Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>3</sup>

Pada tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan bahkan kedudukannya dapat disejajarkan dengan perbankan konvensional karena sistem perbankan nasional kita menganut *dual banking system*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini menjadikan Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip syariah, baik itu dengan cara mendirikan kantor baru, mengkonversi kantor lama menjadi kantor bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun membentuk Unit Usaha Syariah yang tersendiri yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank yang bersangkutan. Sebagai implikasi penerapan *dual banking system* tersebut, perbankan syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada Bank Konvensional.<sup>4</sup>

Keinginan untuk memiliki suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai Perbankan Syariah akhirnya terwujud, yaitu dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Lahirnya UU tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan dan pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, sehingga sejak lahirnya UU tersebut Perbankan Syariah berkembang secara signifikan baik dari aspek kelembagaan maupun kinerja usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sistem *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional masih tetap dipertahankan. Eksistensi Unit Usaha Syariah (UUS) tetap

---

<sup>3</sup> Khotibul Umam, 2016, *Perbankan Syariah; Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

<sup>4</sup> Wirdyaningsih, et.al, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm. 55-56.

dipertahankan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada Bank Konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sampai pada suatu waktu, yakni 15 (lima belas) tahun sejak disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diwajibkan untuk *spin off* (memisahkan diri) dari Bank Konvensional yang menjadi induknya menjadi Bank Umum yang murni melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau menjadi Bank Umum Syariah.

Kewajiban Unit Usaha Syariah melakukan *spin off* atas Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, telah diatur dalam Pasal 68 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

*Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai assetnya telah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum syariah.*

Sedangkan pada ayat (2) sebagai berikut :

*Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, eksistensi UUS dalam sistem perbankan syariah hanya bersifat sementara (transisi), di mana Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk melakukan *spin off* dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah bilamana memenuhi persyaratan tertentu. Pengertian *spin off* dalam Undang-Undang ini adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*Spin off* atas UUS menjadi Bank Umum Syariah akan dilakukan bilamana nilai aset UUS yang bersangkutan telah mencapai minimal 50% dari total nilai aset bank induknya atau sesudah 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 atau pada tahun 2023. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk menjernihkan penerapan substansi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam sistem perbankan syariah.<sup>5</sup>

*Spin Off* ini bertujuan agar pengelolaan unit usaha bersifat independen, sehingga semakin mudah berkompetisi dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya, serta memberikan pembatasan yang jelas antara UUS dengan BUK (Bank Umum Konvensional), sehingga tidak tercampur dengan usaha yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, pembentukan BUS melalui *spin off* juga masih memiliki kendala, yaitu BUK yang memiliki UUS harus menyisihkan sebagian modalnya untuk UUS. Hal ini menjadi beban baru bagi BUK, khususnya BUK yang tidak memiliki aset yang besar, sehingga dibutuhkan usaha lebih besar agar modal UUS dapat tercukupi.

Kebijakan mengenai *spin off* Unit Usaha Syariah yang diperintahkan oleh Undang-Undang menimbulkan kekhawatiran. Unit Usaha Syariah yang nilai assetnya belum mencapai 50 % dari bank induknya, maka pemisahan harus tetap akan dilakukan pada tahun 2023 menjadi Bank Umum Syariah. Jika Unit Usaha Syariah tersebut telah siap --baik secara moril maupun material-- untuk menjadi suatu badan hukum mandiri maka tentu saja tidak akan menimbulkan permasalahan sehingga kebijakan *spin off* tersebut diproyeksikan akan dapat membawa kemajuan dalam penguatan perbankan syariah.

Namun, apabila kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa adanya suatu persiapan yang matang dari Unit Usaha Syariah, maka dapat diprediksi bahwa kebijakan tersebut akan membawa dampak yang buruk bagi Unit Usaha Syariah tersebut saat menjadi Bank Syariah. Bank induknya (konvensional) sudah tidak dapat ikut campur lagi dalam “rumah tangga” mantan Unit Usaha Syariahnya tersebut. Bank syariah hasil *spin off* tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun baik finansial maupun infrastruktur dari bank induknya. Apabila Bank Syariah baru tersebut tidak dapat menata kelembagaanya dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, 2014, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 2, hlm. 113.

bahwa bank tersebut akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan mengembangkan diri bahkan dalam kondisi terburuk dapat mengalami kebangkrutan.

Ini menjadi menarik ketika ditinjau dari kronologi dari adanya pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Isi dari pasal tersebut merupakan produk politis karena bisa saja Undang – Undang ini memaksa para pelaku bisnis Syariah untuk merubah Bank Konvensional yang mempunyai layanan syariah menjadi Bank Syariah dalam waktu singkat karena mengingat pasar Bank Syariah di Indonesia diyakini sangat menjanjikan. Politik hukum ini mengarah pada perumusan konkret tentang apa dan bagaimana seharusnya hukum yang akan datang, yang akan dibentuk, dirumuskan agar mencapai tujuan yang dicita-citakan. Politik hukum (*legal policy*) mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun. Dengan munculnya pasal tersebut tentunya, DPR RI dan Pemerintah telah mengkaji secara matang tentang perkembangan Bank Syariah di waktu yang akan datang.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai kronologi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan memfokuskan pada pasal 68. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul : **Konfigurasi Politik Hukum Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Penerapan *Spin Off* pada Perbankan Syariah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?
2. Bagaimana konfigurasi politik hukum Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang penerapan *spin off* pada Perbankan Syariah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kronologi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Untuk mengetahui konfigurasi politik hukum Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang penerapan *spin off* pada Perbankan Syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat obyektif maupun manfaat subyektif sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Obyektif**

Manfaat obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologi pembentukan sebuah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan mengetahui kronologi, dinamika politik dan konfigurasi politik hukum Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

#### **b. Manfaat Subyektif**

Manfaat subyektif dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai perbankan syariah, khususnya, tentang kronologi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan konfigurasi politik hukum pasal 68 mengenai penerapan *spin off* dalam perbankan syariah, serta untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama menjalani perkuliahan pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa artikel yang telah membahas *spin off* dan politik hukum atau sejenisnya dalam perbankan syariah, diantaranya, pertama, artikel dari Amalia Nasuha dengan judul “Dampak Kebijakan *Spin Off*

Terhadap Kinerja Bank Syariah” dalam penelitiannya ada perbedaan kinerja keuangan dari lima bank syariah di Indonesia yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Victoria Syariah satu tahun sebelum kegiatan *spin off* dan satu tahun setelah kegiatan *spin off*. Dari sembilan variabel yaitu aset, pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), laba bersih, CAR, NPF, FDR, ROA, dan ROE yang diuji dengan metode *Wilcoxon Signed Ranks Test* menunjukkan bahwa perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah *spin off* terjadi pada tiga variabel, yaitu: aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang kurang dari  $\alpha$ . Artinya, terdapat pengaruh sebelum aktivitas *spin off* dan sesudah. Sedangkan pada variabel lainnya, CAR, FDR, ROA, dan ROE tidak menunjukkan perbedaan kinerja antara satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah *spin off*, dengan nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$ . Hal ini mungkin disebabkan karena *spin off* masih baru dipraktikkan di industri perbankan syariah, sehingga jangka waktu pengujian masih pendek.<sup>6</sup>

*Kedua*, artikel dari Khotibul Umum, dengan judul “Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional” yang membahas bahwa mekanisme *spin off* UUS menjadi Bank Umum Syariah dapat ditempuh melalui dua alternatif, yaitu, pertama, mendirikan Bank Umum Syariah yang baru, kedua, mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada. Implikasi *spin off* UUS terhadap ketaatan bank dalam menjalankan prinsip syariah adalah cenderung meningkat, karena dengan tindakan tersebut UUS akan berubah menjadi BUS yang merupakan badan hukum mandiri (*separate legal entity*). Konsekuensi hukum yang muncul adalah pengelolaan BUS akan terpisah dari BUK selaku induk perusahaan, baik dari sisi pengelolaan keuangan maupun operasional kegiatan usaha.<sup>7</sup>

*Ketiga*, artikel dari Yusuf Wibisono, dengan judul “Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah; Peluang dan Tantangan Regulasi

---

<sup>6</sup> Amalia Nasuha, 2012, *Dampak Kebijakan Spin Off Terhadap Kinerja Bank Syariah*, Al Iqtishad, Vol. 2., No. 2., hlm. 257.

<sup>7</sup> Khotibul Umam, 2010, *Peningkatan Ketaatan Syariah melalui Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, hlm. 622.

Industri Perbankan Syariah” yang menerangkan secara umum, UU Perbankan Syariah telah memuat banyak hal penting yang dibutuhkan perbankan syariah untuk tumbuh dan berkembang dan membutuhkan lebih banyak lagi dukungan regulasi yang progresif, visioner, dan berbasis pasar. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat persaingan global yang semakin sengit. Inisiatif yang paling dibutuhkan perbankan syariah kini untuk kasus Indonesia adalah upaya atau insentif dan keberpihakan untuk membesarkan size dan jaringan perbankan syariah dalam rangka mencapai *critical mass*. Perbankan syariah dengan tercapainya *critical mass* akan mencapai efisiensi dan menaikkan daya saingnya terhadap perbankan konvensional. Jika hal ini tercapai, maka perbankan syariah dapat menjadi *mainstream*, tidak lagi sekadar alternatif.<sup>8</sup>

*Keempat*, buku karangan Abdul Halim, (2000), yang berjudul “Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia; Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif”, yang kesimpulannya bahwa produk hukum UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lahir dari konfigurasi politik yang demokratis dan karakter hukum yang responsif. Maka, dari segi perspektif materi hukum, politik hukum pemerintah bersifat otonom dan responsif atau populistik, di mana produk hukum ini mencerminkan harapan masyarakat dan rasa keadilan.<sup>9</sup>

*Kelima*, buku karangan Amran Suadi dan Mardi Candra, (2016), yang berjudul, Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah”, yang membahas mengenai seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan hukum dan kelembagaannya serta penerapannya di tengah-tengah tatanan kehidupan berbangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga

---

<sup>8</sup> Yusuf Wibisono, 2009, *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah; Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, Nomor 2, hlm. 114.

<sup>9</sup> Abdul Halim, 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia; Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 164.



membahas peranan politik hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum ekonomi syariah serta hukum pidana Islam.<sup>10</sup>

Dari kelima penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan kelima penelitian di atas, karena dilihat dari judul dan pembahasannya berbeda. Penelitian ini menekankan kepada konfigurasi politik hukum pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai penerapan *spin off* pada Perbankan Syariah.

## 2. Kerangka Teori

Teori sangat penting dalam sebuah penelitian. Teori digunakan untuk membaca isi penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan teori politik hukum. Ada beberapa pengertian dan corak tentang politik hukum tetapi dalam penelitian ini menggunakan teori politik hukum Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>11</sup>

Pemikiran Mahfud MD dalam politik hukum membahas tentang konfigurasi politik. Menurut Mahfud MD, konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.<sup>12</sup>

Untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu : Partai politik dan lembaga perwakilan rakyat, Peranan lembaga eksekutif (pemerintah), dan peran Pers. Dalam setiap konfigurasi politik akan menghasilkan karakter produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Sedangkan produk hukum

---

<sup>10</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-2, hlm. Xiv.

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 30-31.

ortodoks adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, mencerminkan keinginan pemerintah.

Indikator yang dipakai, apakah produk perundang-undangan termasuk produk hukum yang responsif atau ortodoks, adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.

Penelitian ini akan menganalisis konfigurasi politik hukum pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, mengenai penerapan *spin off* pada Perbankan Syariah. Apakah dalam pembentukan pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah termasuk konfigurasi politik hukum yang demokratis atau otoriter dan bagaimana karakter produk hukumnya termasuk yang responsif atau ortodoks? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan kerangka teori yang telah disampaikan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>13</sup> Mengutip Bogdan dan Taylor, Lexy J. Moleong mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup>

Penelitian ini mendasarkan pada studi literer yaitu di buku Kronologis Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dari Dewan Perwakilan Rakyat RI. Karenanya, penelitian ini boleh juga disebut sebagai *library research* (studi literer). Penelitian ini untuk mengungkap kronologi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

---

<sup>13</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2003, *Basics Of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques*, Terj. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data* oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 4.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosdakarya, Cet. XXI, hlm. 4.

2008 dengan memfokuskan pada konfigurasi politik hukum pasal 68 tentang penerapan *spin off* pada Perbankan Syariah dalam sidang DPR RI.

## **2. Data dan Sumber Data**

Data adalah sebuah informasi yang aktual dan faktual, yang akan sangat berguna dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer adalah sumber data pokok yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data pertama atau data baru yang memiliki sifat faktual. Sumber Data primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber Data sekunder adalah sumber data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, bahan-bahan kepustakaan yang telah ada. Sumber data sekunder yang primer dalam penelitian ini berupa Kronologis Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dari DPR RI. Di samping itu, peneliti juga merujuk pada buku-buku literatur yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti, dokumen atau arsip, artikel, Jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan berita di internet tentang politik hukum dan *spin off*.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>15</sup> Untuk mengumpulkan data di atas digunakan teknik studi kepustakaan. Pengumpulan data primer penelitian ini dilakukan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, Cet.Ke-10, hlm. 62.

dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.<sup>16</sup> Kepustakaan atau dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini bisa berbentuk tulisan berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan, ada yang berupa gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.<sup>17</sup> Kegiatan pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini tidak terpisah satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Oleh karena itu, analisis yang digunakan penelitian hukum ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan penelitian analitis yaitu, analisis yang ditujukan untuk menguji hipotesis-hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan.<sup>18</sup>

Penelitian ini juga menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi ini merupakan analisis penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis, baik berupa buku, jurnal atau yang tercetak dalam media massa.<sup>19</sup> Dengan analisis ini, bisa menjadikan pembahasannya menjadi mendalam sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Op Cit*, hlm.103.

<sup>18</sup> Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, Cet. Ke-9, hlm. 75.

<sup>19</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-2., hlm. 165.

## Bab I Pendahuluan

Uraian dalam bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

## Bab II Kajian Teori

Bab kajian teori memuat sub bab tentang Konfigurasi Politik, Politik Hukum, Perbankan Syariah, *Spin Off* pada Perbankan Syariah, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Tahapan proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia.

## Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uraian dalam bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai kronologi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan kronologi dan dinamika politik pembentukan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang penerapan *Spin Off* pada Perbankan Syariah serta konfigurasi politik hukumnya.

## Bab IV Penutup

Uraian dalam bab penutup ini berisi simpulan dan saran.